

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian terkait Implementasi Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan indikator berdasarkan dari George Edward III yang memiliki 4 (empat) indikator, meliputi : (a) Komunikasi; (b) Sumberdaya; (c) Disposisi; dan (d) Struktur Birokrasi.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil rekapitulasi dari 4 (empat) indikator implementasi kebijakan Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten, meliputi :

#### a) Komunikasi

Puskesmas Telaga Murni telah menjalankan sosialisasi dan pelayanan sebagaimana mestinya berdasarkan prosedur yang berlaku dengan baik. Koordinasi yang dilakukan antar staf atau pengurus Puskesmas dengan para kader Posyandu juga berjalan dengan baik sehingga mempermudah pemahaman masyarakat dan proses pelayanan kesehatan. Terkait monitoring dan evaluasi juga sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh tim khusus pada bidangnya.

#### b) Sumberdaya

Terkait indikator sumberdaya, Puskesmas Telaga Murni dalam proses implementasi kebijakan Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi juga sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pasalnya, para staf yang bertugas sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga memang sesuai dengan kemampuannya. Untuk fasilitas pembantu yang tersedia di Puskesmas juga ada Posyandu dan Posbindu sudah berjalan dengan fasilitas yang memadai dengan anggaran dari desa. Informasi yang diberikan juga sudah cukup mudah untuk diakses, dapat melalui *social media* berupa *WhatsApp*.

*Groub*. Terkait wewenang diserahkan kembali kepada pimpinan, dimana pimpinan yang dimaksud adalah kebijakan dan wewenang dari dinas terkait yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Jadi Puskesmas hanya menjalankan tugas berdasarkan dengan prosedur atau kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

c) Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, merupakan sikap yang harus dimiliki implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti dengan apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Apabila terdapat perbedaan perspektif dan sikap implementor dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Berdasarkan dengan informasi yang di dapat dari narasumber bahwasanya terkait kader ataupun staf merupakan hak dan wewenang atasan. Untuk insentif, sudah berjalan sebagaimana mestinya.

d) Birokrasi

Organisasi memberikan peta yang mudah dipahami untuk menggambarkan secara garis besar berbagai aktivitas dan jarak dari puncak yang mencerminkan interaksi formal yang diterapkan. Struktur birokrasi bertugas untuk menerapkan kebijakan publik dan memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur organisasi terdapat aspek yaitu Prosedur Operasi Standar (SOP) dan pembagian tugas. Panjangnya struktur organisasi cenderung mengurangi efektivitas pengawasan, menyebabkan munculnya redtape, yaitu prosedur birokrasi yang terlalu rumit sehingga membuat aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Terkait hal ini yang bersangkutan merupakan sebuah standar atau biasa disebut dengan istilah SOP. Hal ini tentu saja sudah berjalan dengan baik dan resmi lengkap dengan SP-nya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor sebagaimana sesuai dengan indikator teori dari George Edward III yang terdiri dari : 1)Komunikasi; 2)Sumberdaya; 3)Disposisi; dan 4)Struktur Birokrasi. Dengan hal tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Permenkes RI

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Tentunya dengan ditemukannya beberapa faktor seperti apa yang sudah di deskripsikan sebelumnya, terdapat upaya yang harus dilaksanakan untuk dapat menjalankan implementasi tersebut.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan dengan penelitian yang berjudul ”Implementasi Permenkes Ri Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi (Studi Kasus: Puskesmas Telaga Murni)”, maka peneliti ingin memberikan saran sebagaimana berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sedikit lebih terbuka terkait informasi pelayanan kesehatan. Bisa melalui *hotline* ataupun website resmi yang berisi tentang sejumlah informasi terkait dinas, pelayanan, badan hukum, struktur organisasi, dan sebagainya.
2. Penguatan koordinasi antara dinas terkait dengan para kader kesehatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menyumbangkan pemikiran serta masukan bagi dinas terkait, masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan informasi terkait ini, serta untuk menyempurnakan proses penelitian selanjutnya.